

## Perbandingan Implementasi Kebijakan Gubernur Sulawesi Barat dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan Poros Salutambung-Aralle

---

<sup>1</sup>Muhammad Gaus, <sup>2</sup>Sukri Tamma, <sup>3</sup>Ariana Yunus

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin

Email: [Gauzztt@gmail.com](mailto:Gauzztt@gmail.com)

### Abstract

*Policy implementation is the most crucial stage of the policy process because, at this stage, benefits will be obtained from previously defined concepts. Regarding the policy for the construction of the Salutambung-Aralle axis, the steps taken were to compare the implementation of the policies of the Governor of West Sulawesi in each period so that the efforts and obstacles of each Governor were found in that period. The research method used is a qualitative approach with a descriptive analysis type. The study results show that during the reign of Anwar Adnan Saleh, efforts to increase the construction of the road got an excellent basis after changing its status from a district road to a provincial strategic highway. Meanwhile, during the administration of the Governor of ABM, policy planning was quite good. Still, it did not have a strong commitment at the implementation stage, as evidenced by various obstacles, including passing incompetent contractors and a lack of communication involving the community.*

**Keywords:** comparison, policy, Governor of SULBAR.

### Abstrak

*Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dari proses kebijakan karena pada tahap ini, akan diperoleh manfaat dari konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle, langkah yang diambil adalah membandingkan implementasi kebijakan Gubernur Sulawesi Barat pada masing-masing periodenya sehingga ditemukan upaya dan kendala setiap Gubernur di periodenya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Anwar Adnan Saleh, upaya peningkatan pembangunan jalan tersebut mendapat dasar yang baik setelah diubah status dari jalan kabupaten menjadi jalan strategis propinsi. Sedangkan pada masa pemerintahan Gubernur ABM, perencanaan kebijakan cukup baik tetapi tidak memiliki komitmen yang kuat pada tahap implementasi, dibuktikan dengan berbagai kendala, diantaranya meloloskan kontraktor yang tidak kompeten serta kurangnya komunikasi melibatkan masyarakat.*

**Kata kunci:** perbandingan, kebijakan, Gubernur SULBAR.

---

## Pendahuluan

Salah satu tugas pemerintah adalah memerhatikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, terlebih jika hal tersebut penting dan mendesak. Asumsi tersebut berdasarkan prinsip bahwa pemerintah merupakan pilihan rakyat sehingga mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih (Hayat et al. 2020)<sup>1</sup>. Solusi yang hadir dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Terkait kebijakan ia merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk output setelah adanya input dari masyarakat. menurut Iskandar bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Rhamdani, Rhamdani 2017)<sup>2</sup>.

Banyak bentuk kebijakan yang bisa disaksikan terutama kebijakan pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah, jembatan, jalan dan masih banyak lagi. Kebijakan seperti itu dikeluarkan demi kepentingan masyarakat dimasing-masing sektor. Menurut penulis setiap kebijakan semestinya berangkat dari analisis masalah sehingga kebijakan-kebijakan yang hendak diambil menjadi tepat sasaran. Analisis masalah yang dimaksud adalah memerhatikan dan mencermati dengan baik kebutuhan masyarakat, dampak dari kebijakan, serta bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga masyarakat bisa ikut serta atau menyambut baik setiap rencana pemerintah. Langkah tersebut ditempuh demi tercapainya tujuan kebijakan yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat (Desrinelti, D et al. 2021)<sup>3</sup>.

Contoh kebijakan pemerintah tersebar di seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diseluruh di Indonesia, di Sulawesi barat misalnya, tepatnya di Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda, pembangunan jalan poros Salutambung sampai Aralle (Salutambung-Aralle). Pembangunan jalan tersebut sejak berdirinya Sulawesi Barat tahun 2004 sampai sekarang, belum selesai dikerjakan oleh pemerintah. Permasalahan ini selalu dikeluhkan oleh hampir seluruh warga karena jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat setempat. Perlu dicatat bahwa sejak berdirinya Sulawesi barat telah terjadi tiga kali mekanisme pemilihan Gubernur dimana dua periode pertama

---

<sup>1</sup> Hayat dkk. *Reformasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

<sup>2</sup> Ramdhani, Abdullah., & Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik(JP)* 11, (2017): 2.

<sup>3</sup> Desrinelti, desrinelti., Magfira Afifa., & Nurhizrah Gistituati. Kebijakan Publik: konsep pelaksanaan. *JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no 1 (2021):83

masing-masing di menangkan oleh Anwar Adnan Saleh (AAS) meskipun dengan wakil yang berbeda. Sedangkan untuk satu periode terakhir di pimpin oleh mantan Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar (ABM). Total tiga periode, pembangunan jalan poros Salutambung-Urekang belum mendapat perhatian yang signifikan.

Permasalahan di atas merupakan pemantik bagi penulis untuk meneliti kebijakan pembangunan jalan tersebut. Penulis juga menganggap hal ini penting untuk diungkap sebagai informasi seputar masalah kebijakan yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah provinsi Sulawesi Barat (SULBAR). Penelitian ini, juga penting sebab akan mengungkap korelasi antara tugas pemerintah daerah sebagaimana amanat undang-undang dan realitas yang terjadi.

Banyak hal yang penting untuk diteliti dari kasus di atas, tetapi penulis akan memfokuskan pada perbandingan implementasi kebijakan kedua Gubernur, pada masa kepemimpinannya di Sulawesi Barat terkait peningkatan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle. Implementasi kebijakan kedua Gubernur tersebut akan dibandingkan sehingga dilihat kepemimpinan siapa yang lebih berkomitmen untuk pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle?

Sebagai informasi awal bahwa daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah sehingga menurut hemat penulis daerah ini efektifnya dapat menambah pendapatan daerah ketika dikelola dengan baik. Salah satu aspek utama untuk menarik masyarakat dalam mengelola potensi tersebut tentunya akses jalan yang baik. Hanya pemimpin yang visioner yang bisa berpikir kreatif yang bisa memajukan daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi tentang upaya setiap pemimpin (Gubernur) SULBAR dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya pembangunan jalan poros Trans Salutambung-Aralle, serta menjelaskan hambatan-hambatan yang membuat pembangunan jalan tersebut belum selesai atau terkendala hingga hari ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain dilakukan oleh Agus Suryono (2014) dengan judul " Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Permasalahan yang dibahas adalah esensi kebijakan publik dalam mewujudkan sila ke lima Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"<sup>4</sup>. Upaya demikian akan terlihat dalam tahap implementasi kebijakan, entah sesuai antara konsep dan realitas atau sebaliknya. Selanjutnya penelitian yang lain dari Asep Hidayat (2018) dengan

---

<sup>4</sup> Suryono, Agus. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi)* 6, (2014): 1.

judul “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung”. Tujuan akhirnya mengevaluasi suatu kebijakan berupa Peraturan yakni, PERWAL No 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Parkiran di Gedung dan Pelataran di Kota Bandung<sup>5</sup>. Penelitian ini mengkaji proses akhir dari kebijakan yakni tahap evaluasi pengimplementasian suatu kebijakan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan (2013) “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik”. Penelitian ini melihat posisi informasi dalam hal ini pengetahuan sangat berperan sentral dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Penelitian ini dilakukan di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan warga kota Bandung belum atau kurang memahami persoalan keterbukaan informasi publik bahkan tidak mengerti upaya pemerintah dalam memberikan informasi dalam mengaplikasikan kebijakan tertentu. hal demikian mempertegas bahwa masih sangat kurang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga partisipasinya masih kurang dan tidak efektif<sup>6</sup>.

Penelitian di atas secara keseluruhan membahas mengenai implementasi kebijakan tetapi umumnya cenderung sampai pada tahap evaluasi atas suatu kebijakan. Secara spesifik penelitian terdahulu juga memfokuskan pada satu aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan seperti terlihat pada penelitian terakhir dari Agus Setiawan (2013). Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan ingin membandingkan implementasi kebijakan dari pemimpin berbeda tanpa mencobaa mengevaluasi kebijakan tersebut.

Penelitian tentang perbandingan Implementasi kebijakan Gubernur SULBAR, dikerangkai dengan teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Hayat etc,2020)<sup>7</sup>. Untuk implementasi kebijakan publik ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Tahapan implementasi kebijakan dijadikan tahapan terpenting dari proses kebijakan. Setelah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Jika tidak dilaksanakan

---

<sup>5</sup> Hidayat, Asep., Aris munandar., & Armidiana. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica (Jurnal Pemikiran Administrasi Negara)* 10, (2018): 85

<sup>6</sup> Setiawan, Agus., Sugiana., Jimi Narotama M. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, (2013): 196.

<sup>7</sup> *ibid*

maka sebuah kebijakan yang dibuat akan sia-sia. Setiap kebijakan akan memiliki dampak, terutama bagi sebagian individu atau kelompok yang merasakan dengan adanya kebijakan akan merasa mendapatkan keuntungan bahkan ada yang merasa dirugikan. (Prianto 2020)<sup>8</sup>.

Beberapa defenisi implementasi kebijakan publik antara lain: Van meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya<sup>9</sup>. Defenisi yang lain, bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya cara atau langkah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Sirajuddin 2014)<sup>10</sup>. Sedangkan Menurut Dunn bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Haerul etc.al, 2016)<sup>11</sup>.

Lebih lanjut, penelitian ini akan merujuk teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (Hayat 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: **Komunikasi**, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mempengaruhi distorsi implementasi. Kedua **Sumber daya**, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia; misalnya, kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Ketiga **Disposisi**, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementayor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Terakhir **Struktur**

---

<sup>8</sup> Prianto, agus. Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi kasus di Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ). *JAK PUBLIK ( Jurnal Adminstrasi dan Kebijakan Publik )* 1, no.3 (2020): 115.

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Sirajuddin, Ilham Arif. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 4, no. 1 (2014): 4.

<sup>11</sup> Haerul., Haedar A., & Hamdan. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Adminstrasi Publik* 6, no.2 (2016): 25.

**birokrasi**, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edward, sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta 13 keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, responden adalah warga kecamatan ulumanda sebagai objek kebijakan tersebut. Instrumen Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *Indept-Interview Analysis* dengan menggunakan pedoman wawancara. Kemudian data dianalisis secara kualitatif, dimana setelah melakukan wawancara penulis akan segera menuliskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

## **Hasil dan Diskusi**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan bahwa, sejak berdirinya pada tahun 2004 propinsi Sulawesi Barat dapat memilih pemimpinnya sendiri sehingga pada tahun itu juga mereka menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dalam hal ini memilih gubernur yang pertama. Akhirnya setelah pemilu pertama tersebut, masyarakat memberikan amanah kepada Anwar Andan Shaleh (AAS) bersama dengan wakilnya Sejak saat itu banyak harapan dari masyarakat SULBAR terkait percepatan pembangunan di segala sektor.

Salah satu hal yang menjadi pekerjaan rumah adalah persoalan jalan transportasi diberbagai daerah yang ada di SULBAR, salah satunya jalan poros Salutambung-Aralle. Terkait jalan tersebut pada periode pertama Gubernur AAS status jalan tersebut masih berstatus jalan kabupaten, artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam hal ini kabupaten Majene. Jalan tersebut, pada saat itu belum termasuk jalan poros yang bisa dibiaya APBD propinsi oleh sebab itu Pemerintah Sulawesi Barat tidak

memberikan perhatian lebih pada peningkatan pembangunan jalan poros yang menghubungkan kabupaten majene dan kabupaten mamasa tersebut.

Menjelang masa jabatan berakhir, Gubernur AAS pada saat itu memberikan janji politik masyarakat Ulumanda untuk menyelesaikan permasalahan jalan tersebut. Praktisnya ia mendulang suara mayoritas di kecamatan Ulumanda dan secara kebetulan AAS juga memenangkan Pilkada untuk kedua kalinya sehingga dipastikan ia menjabat sebagai Gubernur untuk periode kedua. Tuntutan masyarakat khususnya dari Ulumanda menjadi tak terbendung diperiode keduanya sehingga pada tahun 2012/2013 ia menanggapi tuntutan masyarakat dengan menyetujui peningkatan status jalan poros Salutambung-Aralle menjadi jalan strategis propinsi.

Makna dari jalan strategis propinsi yakni pemerintah propinsi bisa memberikan suntikan dana untuk pembangunan jalan tersebut melalui APBD tetapi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi sebab kabupaten masih punya tanggung jawab. Posisi pemerintah propinsi pada status jalan tersebut yakni, bisa memberikan bantuan dana untuk pembangunan jalan tetapi dilain sisi kabupaten tidak bisa berpangkutangan.

Masa pemerintahan AAS dinilai punya progress untuk meningkatkan pembanguan jalan ke Ulumanda setelah aturan tersebut dikeluarkan, meskipun pada akhir masa jabatannya di periode kedua tidak mampu menyelesaikan pembanguan jalan yang dimaksud. Pandangan warga terhadap komitmen AAS terhadap pembanguan jalan poros Salutambung-Aralle masih beragam tetapi dari serangkaian fakta yang ada bisa menguatkan pandangan bahwa AAS selalu mengusahakan peningkatan kebijakan pembanguan jalan poros yang rencananya tembus hingga kabupaten mamasa. Mulai dari kenyataan bahwa peningkatan status jalan tersebut cenderung dipaksakan karena pada masa pemerintahannya jalan tersebut belum sepenuhnya tembus ke Aralle (Mamasa) sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan status jalan tetapi Gubernur AAS dengan keberaniannya tetap menandatangani rencana peningkatan status menjadi jalan strategis propinsi.

Dokumen peningkatan status, dari jalan kabupaten menjadi jalan strategis propinsi tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Sulawesi Barat 2014-2034. Dokumen tersebut setidaknya menjadi bukti usaha-usaha yang dilakukan oleh Gubernur AAS dalam mengusahakan penyelesaian pembanguan akses yang selama ini dikeluhkan warga setempat. Banyak yang menilai bahwa AAS gagal dalam menyelesaikan tugasnya di Ulumanda tetapi di sisi lain banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan AAS sudah lebih dari cukup karena

secara rasional ia tidak dapat menyelesaikan karena masa jabatan yang terbatas.

Gubernur AAS adalah perintis yang mengusahakan pembangunan jalan sehingga tembus Aralle (Kabupaten Mamasa). Usaha tersebut dilakukan pasca peningkatan status jalan demi menguatkan peraturan yang telah disepakati. Dasar yang telah ditetapkan oleh AAS seyogyanya bisa dilanjutkan oleh Gubernur selanjutnya demi keberlanjutan pembangunan. Peningkatan status jalan sudah menjadi ultimatum kuat bahwa siapapun Gubernur selanjutnya, harus memperhatikan Ulumanda sebab ia telah masuk mejadi salah satu tanggung jawab pemerintah propinsi SULBAR.

Dari serangkaian fakta yang terjadi pada masa pemerintahan Guberur AAS terkait pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle, menurut kacamata teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, salah satu variable yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Poin komunikasi membahas mengenai langkah apa yang harus dilakukan oleh implementator sehingga kebijakan yang hendak diambil dapat tepat sasaran. Gubernur AAS setidaknya mempunyai kemampuan dalam menerjemahkan keinginan masyarakat setelah berupaya meningkat status jalan. Langkah yang diambil menurut penulis telah mampu menjawab keinginan masyarakat setelah beberapa kali menyampaikan aspirasinya. Artinya komunikasi yang dibangun oleh masyarakat dapat direspon dengan cukup baik oleh Gubernur AAS sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran meskipun hanya pondasi awal yang dibenahi demi peningkatan untuk masa yang akan datang.

Setelah jabatan AAS sebagai gubernur diperiode kedua berakhir, maka secara otomatis ia tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi kandidat Gubernur periode selanjutnya karena konstitusi telah mengatur hanya diperbolehkan menjabat maksimal dua periode. Setelah pemilihan Gubernur diperiode ke tiga maka masyarakat Sulbar memberikan amanah kepada Ali Baal Masdar (ABM) untuk menjadi Gubernur SULBAR selanjutnya.

Lahirnya pemimpin baru tentu banyak harapan untuk menjadi pelanjut pembangunan sekaligus sebagi pelurus dari kebijakan yang dianggap tidak produktif yang dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. Banyak persoalan yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Gubernur ABM. Salah satunya adalah pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle. Pembangunan jalan tersebut tidak bisa selesai pada pemerintahan Gubernur AAS tetapi ia telah berhasil merubah status menjadi jalan strategis propinsi sehingga Gubernur ABM wajib melanjutkan pekerjaan jalan tersebut.

Tahun 2018 jalan poros Salutambung-Aralle, mendapatkan suntikan dana dari Provinsi sebesar 8,9 M sehingga ini di sambut suka cita oleh masyarakat. setelah beberapa bulan berjalan progres pekerjaan tidak begitu signifikan sehingga mengundang banyak pertanyaan khususnya Aliansi masyarakat yang selalu melakukan pengawalan terhadap pembangunan jalan yang tembus hingga ke kabupaten Mamasa. Akhirnya setelah di cek kontraktor yang memenangkan tender tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat setempat.

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa kontraktor tersebut memang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan pekerjaan. Menurut hasil wawancara, alat berat yang digunakan bukan milik sendiri tetapi disewa sehingga akan menghabiskan banyak anggaran hanya untuk sewa alat berat. Kondisi demikian menjadi tanda bahwa pemenang tender cenderung politis dipaksakan. Setelah kasus tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum maka kasusnya pun terungkap bahwa pada proses tender proyek pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle terdapat transaksi berupa Uang 1 M sebagai jaminan untuk memangkan pihak kontraktor.

Di tahun berikutnya kebijakan peningkatan pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Majene dan Mamasa tepatnya ditahun anggaran 2019/2020 tidak mendapatkan alokasi anggaran sebab Negara sedang dilanda covid 19. Kondisi demikian mengakibatkan pengalokasian anggaran ke jalan tersebut tidak memiliki progress. Pada tahun 2021 pemerintah memanfaatkan dana teknis yang bersumber dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk memperbaiki beberapa ruas jalan di Sulawesi Barat termasuk jalan poros Salutambung-Aralle.

Selama pemerintahan Gubernur ABM pengalokasian anggaran yang bersumber dari PEN ke jalan poros Salutambung-Aralle telah dianggarkan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 implementasi kebijakan tersebut berjalan cukup baik meskipun pada proses awal terjadi kendala sebab mekanisme yang ditawarkan harus tutup full jalan sehingga banyak mendapat protes dari masyarakat. selanjutnya di tahun 2021 alokasi anggaran untuk meningkatkan pembanguna jalan cukup besar yakni 21 M. implementasi kebijakan pembangunan jalan disambut baik oleh masyarakat. pekerjaan jalan pada tahun tersebut dari awal tidak memberikan progres yang baik sampai berakhirnya kontrak. Pekerjaan jalan yang sedianya dikerjakan mulai pada bulan November tahun 2021 – Maret 2022 hanya bisa dikerjakan sebanyak 33% dari total pekerjaan. Ironisnya pekerjaan dengan dana yang sama di Kabupaten lain telah mencapai 100% tetapi lain hal untuk pembangunan jalan di Kecamatan Ulumanda tersebut.

Kontraktor yang memenangkan tender pengerjaan jalan tersebut ternyata tidak mampu merampungkan tugasnya. Banyak kendala yang menjadi faktor kegagalan mereka antara lain alat yang digunakan mayoritas adalah sewaan, juga medan yang kurang mendukung. Dana yang bersumber dari PEN baru akan cair sebanyak 50% kalau pekerjaan telah mencapai 30% sehingga dibutuhkan kontraktor yang betul-betul mumpuni dari aspek sumber daya sebab tidak ada dana panjar dari PU. kenyataanya Kontraktor yang memenangkan tender tidak kompeten dan mumpuni jika dilihat dari progress pembangunannya. Pihak terkait kembali memaksakan mereka untuk menang tender.

Dari serangkaian fakta yang ada bahwa Gubernur ABM cenderung hanya menggunakan dan taktis untuk pembangunan jalan ke Ulumanda. ABM dinilai memiliki rencana kebijakan yang baik dalam upaya peningkatan kebijakan pembangunan jalan tetapi pada tahap pengimplemntasian banyak kendala serius, antara lain: melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) cenderung meloloskan kontraktor yang tidak mumpuni atau kompeten dalam pembangunan jalan sehingga pengimplementasian tidak memiliki dampak yang signifikan dari tujuan awal. Selanjutnya tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan titik nol pekerjaan sehingga selalu menuai kritik setiap pengimplementasian sehingga berimplikasi pada kekaburan atas keinginan masyarakat setempat dititik mana yang paling layak untuk dikerjakan.

Berdasarkan uraian diatas terkait pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle pada masa pemerintahan ABM, dari kacamata teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III aspek komunikasi belum mampu dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan banyaknya masalah yang tidak konStrukturktif pada aspek implementasi. Sumber daya yang dimiliki terkait kompetensi implementator dan sumber daya finansial juga masih kurang memadai terutama pada aspek kompetensi implementator. Kecakapan implementator kebijakan masih sangat kurang dilihat dari beberapa kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan jalan tersebut kurang siap dan cenderung dipaksakan karena persolan kepentingan praktis.

Disposisi yang melingkupi persoalan komitmen implementator kebijakan sudah terbantahkan sejak awal ketika proses tender pada tahun 2018 meloloskan kontraktor yang tidak kompeten serta tidak memiliki visi membangun sehingga aspek terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi tidak mengambil peran karena dari organisasi itu juga yang meniscayakan masalah implementasi kebijakan.

## Kesimpulan

Implementasi kebijakan peningkatan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle telah mendapat dasar yang baik pada masa pemerintahan Gubernur Anwar Adnan Saleh (AAS) setelah ia meningkatkan Status menjadi jalan strategis provinsi. sedangkan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Baal Masdar kurang memperlihatkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pembangunan jalan tersebut mulai dari komunikasi yang kurang menyoal apa yang harus dilakukan sampai pada sumber daya implementator yang tidak mumpuni mewarnai satu periode kepemimpinannya. Olehnya demikian pengimplementasian kebijakan sangat ditunjang oleh pemimpin yang visioner demi untuk memastikan variabel implementasi kebijakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

## Daftar Pustaka.

- Desrinelti, desrinelti., Magfira Afifa., & Nurhizrah Gistituati. 2021. Kebijakan Publik: konsep pelaksanaan. JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia. 6 (1) 83
- Dunn, willian N. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haerul., Haedar A., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Adminstrasi Publik*. 6 (2) 25.
- Hayat dkk. *Reformasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hidayat, Asep., Aris munandar., & Armidiana. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica( Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 10 (2) 85
- Prianto, agus. 2020. Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi kasus di Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ). *JAK PUBLIK ( Jurnal Adminstrasi dan Kebijakan Publik )*. 1 (3) 115.
- Ramdhani, Abdullah., & Muhammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik(JP)* 11 (1) 2.
- Setiaman, Agus., Sugiana., Jimi Narotama M. 2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 1 (2) 196.
- Sirajuddin, Ilham Arif. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 4 (1 ) 4.

Suryono, Agus. 2014. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *TRANSPARANSI (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi)*. 6 (2) 1.